

**PERANAN PENGAWASAN DISNAKERTRANS JAWA
TIMUR TERHADAP PEMBERIAN HAK UPAH
LEMBUR BAGI TENAGA KERJA**

SKRIPSI



OLEH :

DIVA MAYA ARDANA

21300059

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2025

**PERANAN PENGAWASAN DISNAKERTRANS JAWA
TIMUR TERHADAP PEMBERIAN HAK UPAH
LEMBUR BAGI TENAGA KERJA
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

DIVA MAYA ARDANA

21300059

SURABAYA, 15 JANUARI 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENG GARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn.

**PERANAN PENGAWASAN DISNAKERTRANS JAWA
TIMUR TERHADAP PEMBERIAN HAK UPAH
LEMBUR BAGI TENAGA KERJA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

DIVA MAYA ARDANA

NPM : 21300059

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 JANUARI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. JOKO NUR SARIONO., S.H., M.H**

(KETUA)

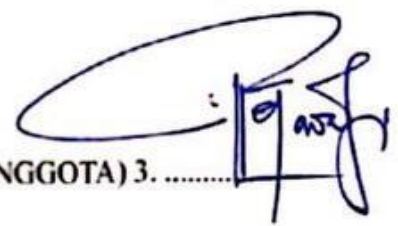
1.


2. **BAMBANG YUNARKO., S.H., M.H**

(ANGGOTA) 2.



3. **Dr. DESY NURKRISTIA TEJAWATI., S.H., M.kn** (ANGGOTA) 3.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang maha segalanya, atas seluruh vurahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Peranan Pengawasan Dinaertrans Jawa Timur Terhadap Pemberian Hak Upah Lembur Bagi Tenaga Kerja ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.B.K.L., Subsp. Onk (K). FICS selaku Rektor Universitas wijaya kusuma surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Hj. Umi Enggarsasi, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Fries Melia S., S.H., M.H selaku Kepala program Studi Fakultas Hukum Universitas wijaya kusuma surabaya
4. Ibu Dr. Peni Jati Setyowati., S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.
5. Ibu Desy Nurkristia Tejawati S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dalam mengarahkan dan membimbing, yang telah sabar membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi.
6. Bapak Dr. Joko Nur Sariono S.H., M.H dan Bapak Bambang Yunarko S.H., M.H selaku dosen penguji yang sabar dalam memberikan saran dan masukan untuk skripsi saya
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
8. Bapak Dr. Sugeng Lestari S.H., M.H. selaku Kepala seksi kelembagaan hubungan industrial Disnakertrans Jatim yang sudah membantu memberikan informasi terkait penelitian.
9. Orang Tua tercinta Bapak Aman Munadi dan Ibu Muryani yang senantiasa memberikan dukungan, doa, restu dan bantuan materi, serta menjadi semangat motivasi penulis menyelesaikan proposal skripsi.
10. Kakak Dana Cheriana S.E penulis yang selalu mengarahkan dan membimbing yang terbaik untuk adiknya.
11. Teman seperjuangan Nanda Tri Novebryanti, Tiara Putri Maharani, Della Oktavia Kusnandar, dan Nur Cholifa Syafa I. yang senantiasa menemani

dan menjadi Teman pada masa kuliah, selalu membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi.

12. Sahabat saya Nyimas Ayu Mahmudah dan Izzati Masfufah yang bersedia menjadi tempat keluh kesah selama penulis menyusul skripsi, serta memberikan semangat, dorongan, dan doa.
13. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekuarangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang telah membacanya.

Surabaya, 14 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Diva Maya Ardana
NPM : 21300059
Alamat : Jl. Sememi Baru 6/2b Sememi, Benowo
No.Telp (HP) : 081217133087

Menyatakan bahwa penelitian saya berjudul: “PERANAN PENGAWASAN DISNAKERTRANS JAWA TIMUR TERHADAP PEMBERIAN HAK UPAH LEMBUR BAGI TENAGA KERJA” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan ke media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 21 Juni 2024

Yang Menyatakan,


(DIVA MAYA ARDANA)
F77AFAMX155938833

NPM : 21300059

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL DALAM	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Kerangka Konseptual	12
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.7 Pertanggung Jawaban	21
BAB II	23
2.1 Pengaturan Upah Lembur Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	23
2.2 Peranan Disnakertrans Atas Upah Lembur	34
2.3 Hambatan dalam pengawasan Disnakertrans	42
BAB III.....	47
3.1 Akibat Hukum yang terjadi pada perusahaan.....	47
3.2 Upaya hukum bagi pekerja.....	53
3.3 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	57
3.4 Dampak perusahaan	64
BAB IV	68
PENUTUP.....	68
DAFTAR BACAAN	71
LAMPIRAN.....	74

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Peranan Pengawasan Disnakertrans Jawa Timur Terhadap Pemberian Upah Lembur Bagi Tenaga Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami dari Peranan pengawasan Disnakertrans Jawa Timur terhadap pemberian hak upah lembur bagi tenaga kerja dan Akibat Hukum yang terjadi jika perusahaan tidak memberikan hak upah lembur pada pekerja.

Metode penelitian pada skripsi ini yang digunakan merupakan Tipologi penelitian dengan pendekatan penelitian Normatif yang berfokus pada pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Kesimpulan yang di dapat pada permasalahan pertama adalah Pengawasan terhadap pemberian hak upah lembur merupakan salah satu tanggung jawab penting Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur dalam memastikan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah lembur merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk memberikan kompensasi yang adil bagi pekerja yang melebihi jam kerja normal. Disnakertrans memiliki tugas penting dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku terkait pemberian upah lembur.

Kesimpulan permasalahan yang di dapat pada permasalahan kedua adalah akibat hukum yang terjadi jika perusahaan tidak memberikan hak upah lembur pada tenaga kerja. Akibatnya perusahaan mendapatkan peringatan dari Disnakertrans berupa nota peringatan yang diharuskan memberikan kewajiban bagi tenaga kerja berupa hak upah lembur. Jika perusahaan tersebut masih tetap tidak memberikan hak upah lembur kepada pekerja maka menurut Undang-undang ketenagakerjaan dapat dikenai sanksi denda dan sanksi administratif.

Kata Kunci : Pengawasan, Disnakertrans Jawa Timur, hak upah lembur, ketenagakerjaan, kepatuhan perusahaan.

ABSTRACT

This thesis is entitled The Role of Supervision of the East Java Manpower and Transmigration Department in Providing Overtime Pay for Workers. This research aims to analyze and understand the supervisory role of the East Java Manpower and Transmigration Department regarding the granting of overtime pay rights to workers and the legal consequences that occur if companies do not provide workers with overtime pay rights.

The research method used in this essay is a research typology with a normative research approach that focuses on the Legislative Regulations approach and the Conceptual Approach. The legal materials used are Law Number 13 of 2023 concerning Employment and Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.

The conclusion that can be drawn on the first problem is that monitoring the granting of overtime pay rights is one of the important responsibilities of the East Java Manpower and Transmigration Service (Disnakertrans) in ensuring the fulfillment of labor rights in accordance with applicable laws and regulations. Overtime pay is a right regulated in the Labor Law to provide fair compensation for workers who exceed normal working hours. The Manpower and Transmigration Department has an important task in ensuring that companies comply with applicable regulations regarding the provision of overtime pay.

The conclusion of the problem that can be obtained in the second problem is the legal consequences that occur if the company does not provide workers with overtime pay rights. As a result, the company received a warning from the Manpower and Transmigration Department in the form of a warning note which was required to provide obligations for workers in the form of overtime pay rights. If the company still does not provide workers with overtime pay rights, according to labor law they can be subject to fines and administrative sanctions.

Keywords : *Supervision, East Java Manpower and Transmigration Office, overtime pay rights, employment, company compliance.*